

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Zuhaily, Muhammad, 1995, *Taarih al-Qadla' Fil al-Islaam*, Daru al-Fikry Damascus, Syuriah.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Aripin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia Cetakan Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Arto, A Mukti, 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fauzan, H. M., 2013, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2010, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.
- Purnamasari, Irma Devita, 2010, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, PT Mizan Pustaka, Bandung.
- Rasyid, H. Chatib & Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta.

Rasyid, H. Roihan A., 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar, dan Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indoensia*, UII Press, Yogyakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

## **B. Tesis**

Dra. Sri Suwastini, "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Pontianak", *Tesis*, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014.

Listyo Budi Santoso, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

#### D. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51e582b1ad14c/prosedur-hibah-tanah-dan-bangunan-kepada-keluarga>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2016.

<http://repo.unsrat.ac.id/292/1/KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWA H TANGAN YANG TELAH MEMPEROLEH LEGALITAS DARI NOTARIS LUSY KFR GE.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017, yang mengutip buku Setiawan, 1989, *Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Varia Peradilan 48, Hlm. 48.

<http://kab-serang.bpn.go.id/Layanan-Pertanahan/Daftar-PPAT/sosialisasi-tata-kelola-blanko-akta-ppat-44186.aspx>, diakses pada tanggal 24 Februari 2017.

[http://pa-purbalingga.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=269&Itemid=110&lang=id](http://pa-purbalingga.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=269&Itemid=110&lang=id), diakses pada tanggal 7 Maret 2017.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3157/arti-gugatan-dikabulkan,-ditolak,-dan-tidak-dapat-diterima>, diakses pada tanggal 31 Mei 2017.